

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dalam mengurus dan mengelola laporan keuangan daerahnya sendiri sebagai alat pengendalian dan suatu bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilakukan. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahnya yaitu upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dengan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah dibuat harus berkualitas dan berguna agar para pemakai laporan keuangan (*stakeholder*) dapat memahami informasi yang terkandung dalam laporan keuangan tersebut.

Menurut Bastian (2010:297), tujuan laporan keuangan sektor publik adalah menyediakan informasi mengenai sumber daya, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan, menyediakan informasi mengenai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya, menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas dalam membiayai aktivitasnya dan memenuhi kewajiban serta komitmennya, menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan suatu entitas dalam perubahan yang terjadi, dan menyediakan informasi secara keseluruhan yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas menyangkut biaya jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Dalam Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 laporan

pemerintah yang baik harus mencakup empat karakteristik, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Dengan kemajuan teknologi pada saat sekarang ini, instansi-instansi pemerintah mulai meninggalkan sistem manual dan beralih kepada sistem teknologi yang modern. Dalam pembuatan laporan keuangan yang berkualitas, pemerintah daerah harus mengimplementasikan sebuah sistem aplikasi dalam pembuatan laporan keuangan daerah yang baik. Menurut Usman (2002:70), implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar suatu aktivitas untuk pegawai pemerintah melainkan suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan.

Dalam kegiatan untuk mencapai tujuan, pemerintah harus menggunakan program aplikasi yang memadai agar dapat membantu dalam pembuatan laporan keuangan yang akan disajikan secara relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mengembangkan suatu sistem aplikasi komputer yang dapat mengelola data transaksi keuangan menjadi laporan yang dapat dimanfaatkan, aplikasi tersebut merupakan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA).

SIMDA merupakan sebuah program aplikasi yang diperkenalkan oleh BPKP pada tanggal 29 Agustus 2006. Aplikasi ini berguna untuk mempermudah pemerintah dalam pembuatan laporan keuangan daerah. Program aplikasi SIMDA ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam

mengelola laporan keuangan yang berkualitas. Menurut Djaja (2009: 87), tujuan program aplikasi SIMDA yaitu untuk mempermudah pengelola keuangan daerah pada SKPD serta meminimalis terjadinya suatu kecurangan. Dalam menggunakan program aplikasi SIMDA seorang *user* atau sumber daya manusia harus berkualitas. Sumber daya yang berkualitas merupakan sumber daya yang memiliki kompetensi, yaitu pemahaman dalam akuntansi dan penguasaan dalam menggunakan program aplikasi tersebut. Dengan didukungnya kualitas sumber daya manusia, laporan keuangan yang dihasilkan juga akan baik.

Dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah tidak hanya didukung oleh pemahaman dalam menggunakan SIMDA dan kualitas sumber daya manusia tetapi juga harus berpedoman pada standar akuntansi yang telah ditentukan. Menurut Mahmudi (2011:271), standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Mengacu dengan amanat UU No.17 tahun 2013 tentang keuangan negara, kemudian pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 yang kemudian digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

PP No.71 tahun 2010 merupakan pedoman proses penyusunan laporan keuangan pemerintah yang secara mutlak harus dijadikan pedoman dalam penyusunan agar kualitas laporan keuangan pemerintah Indonesia dapat ditingkatkan. Dengan demikian, penerapan standar akuntansi pemerintah

diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan dipemerintah pusat dan pemerintah daerah (Noordiawan et al, 2009:123).

Untuk menyusun laporan keuangan juga harus mendapat dukungan dari atasan. Seorang pegawai yang berkerja dalam pembuatan laporan keuangan tidak lepas dari dukungan, perintah atau aturan dari seorang atasan. Apabila tidak ada dukungan dari atasan, maka akan terjadi rendahnya kualitas dalam pembuatan laporan keuangan begitu pula sebaliknya. Dukungan dari atasan yang diberikan kepada pegawai bisa berupa motivasi, pengawasan kerja, maupun pelatihan kepada pegawai. Semakin baik dukungan yang diberikan atasan kepada pegawai diharapkan semakin baik pula laporan keuangan pemerintah.

Menurut Ardana, dkk (2009:33), dukungan manajemen puncak merupakan tanggung jawab seorang manajer atau atasan untuk mampu menyemangati setiap karyawan guna mampu mewujudkan tujuan organisasi dengan kinerja yang optimal. Jika tingkat dukungan manajemen puncak rendah, maka manajemen puncak tidak mungkin terlibat dalam pembuatan laporan keuangan yang berkualitas. Hal ini juga dapat disebabkan bahwa atasan memberikan arahan dan berkomunikasi secara baik kepada pegawai, sehingga memberikan rasa percaya diri kepada pegawai untuk bekerja dalam pembuatan laporan keuangan yang berkualitas.

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan Yohanes (2013), Alfian (2015), Ida (2016),

Khayatun (2015), Ismi, Sri, dan Annisa (2017). Penelitian ini merupakan pengembangan atas beberapa penelitian tersebut.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya pada penelitian Yohanes (2013), yaitu:

1. Terdapat kualitas aparatur pemerintah daerah yang digantikan dengan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu variabel yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah.
2. Penelitian ini juga menambahkan implementasi sistem informasi manajemen keuangan daerah (simda) dan dukungan manajemen puncak kedalam variabelnya yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah.
3. Populasi dalam penelitian sebelumnya yaitu pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tual, sedangkan populasi pada penelitian ini yaitu pegawai negeri sipil pada OPD di Kabupaten Karanganyar.

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut peneliti mengambil judul penelitian “PENGARUH IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH (SIMDA), KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, DAN DUKUNGAN MANAJEMEN PUNCAK TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah implementasi SIMDA berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD di Kabupaten Karanganyar?
2. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD di Kabupaten Karanganyar?
3. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD di Kabupaten Karanganyar?
4. Apakah dukungan manajemen puncak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD di Kabupaten Karanganyar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh implementasi SIMDA terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD di Kabupaten Karanganyar.
2. Menganalisis pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD di Kabupaten Karanganyar.
3. Menganalisis pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD di Kabupaten Karanganyar.
4. Menganalisis pengaruh dukungan manajemen puncak terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD di Kabupaten Karanganyar.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta memberikan wawasan pemikiran untuk akademisi dan juga profesi dalam rangka mengkaji serta mengembangkannya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini dapat memberikan gagasan tentang implementasi sistem informasi manajemen keuangan daerah (SIMDA), kualitas sumber daya manusia, dukungan manajemen puncak, dan penerapan standar akuntansi pemerintah sebagai langkah untuk perbaikan bagi pemerintah daerah di masing-masing OPD dalam menyusun kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

b. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini dapat memberikan informasi yang akan digunakan sebagai penelitian terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur dalam melaksanakan penelitian berikutnya dan dapat melengkapi penelitian-penelitian yang sebelumnya.

d. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai bahan pembelajaran bagi penulis untuk menambah wawasan keilmuan dan mengembangkan potensi riset yang berkaitan dengan pemerintah daerah.

E. Sistematika Pembahasan

Pembahasan ini terdiri dari lima bab yang garis besarnya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang melandasi pemilihan judul, perumusan masalah. Tujuan penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang pengertian laporan keuangan pemerintah daerah, pengertian implementasi sistem informasi manajemen keuangan daerah, kualitas sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah dan dukungan manajemen puncak, tinjauan dari penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, serta data data dan sumber data, teknik pengambilan data dan secara analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pelaksanaan penelitian, pengumpulan data, pengujian data, dan analisis data penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas, keterbatasan penelitian, serta saran-saran yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN